

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, ASIMETRI
INFORMASI, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN
IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP
KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Sisca Amalia
16.0102.0071

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, ASIMETRI
INFORMASI, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN
IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP
KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:

Sisca Amalia

NIM: 16.0102.0071

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

SKRIPSI

PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, ASIMETRI INFORMASI,
KETAATAN ATURAN AKUNTANSI DAN IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

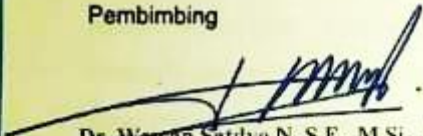
Sisca Amalia

NPM16.0102.0071

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 1 Agustus 2020

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

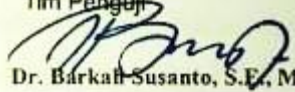

Dr. Wawan Satdyo N, S.E., M.Si., Ak., CA

Pembimbing I

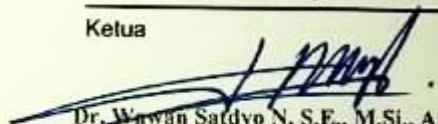

Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak

Pembimbing II

Tim Penguji


Dr. Barkah Susanto, S.E., M.Sc., Ak

Ketua


Dr. Wawan Satdyo N, S.E., M.Si., Ak., CA

Sekretaris


Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

08 SEP 2020


Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sisca Amalia
NIM : 16.0102.0071
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Progam Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUHEFEKTIVITASPENGENDALIANINTERNAL, ASIMETRIINFORMASI,
KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN MPLEMENTASI *GOOD*
GOVERNANCE TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN
AKUNTANSI

(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 1 September 2020
Pembuat Pernyataan,



Sisca Amalia
NIM. 16.0102.0071

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sisca Amalia
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 16 November 1997
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Bagongan Rt 8/Rw 2, Sukorejo, Mertoyudan,
Magelang
Email : amaliasisca404@gmail.com

Pendidikan Formal:

SD (2004-2010) : SD Negeri Sukorejo 2
SMP (2010-2013) : SMP Negeri 12 Magelang
SMA (2013-2016) : SMA Negeri 1 Mertoyudan
PT (2016-2020) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendidikan Non Formal:

- *Basic Learning and Speaking Course* di UMMagelang Language Center.
- Pelatihan Dasar Keterampilan Komputer di UPT Pusat Komputer UMMagelang

Pengalaman Organisasi:

- Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai anggota dan pengurus (2016-2017)

Magelang, 1 September 2020
Pembuat Pernyataan



Sisca Amalia
NPM. 16.0102.0071

MOTTO

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Kegagalan hanya terjadi apabila kita menyerah.”

(Lessing)

“Seringkali, perbedaan di antara menang dan kalah adalah tidak menyerah.”

(Walt Disney)

“Pembalasan dendam yang terbaik adl berupa kesuksesan besar.”

(Frank Sinatra)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Atas karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Magelang).**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Akuntansi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Wawan Sadtyo Nugroho, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Wawan Sadtyo Nugroho, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi
4. Dr. Barkah Susanto, S.E., M.Sc., Ak selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si selaku dosen penguji 2 (dua) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Bapak Suyoto dan Ibu Siti Yunita Ningrum saya ucapkan terimakasih atas do'a dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
8. Adik saya Lucyana Kusuma Dewi yang selalu mendampingi saya dimanapun saya berada. Tenang dan bahagia di Surganya Allah dek.
9. Teman-teman akuntansi angkatan 2016 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Magelang, 1 September 2020



Sisca Amalia
NPM. 16.0102.0071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
2. Manfaat praktis:	10
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS.....	12
A. Telaah Teori	12
1. Teori Segitiga Kecurangan (<i>Fraud Triangle</i>)	12
2. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	15
3. Efektivitas Pengendalian Internal.....	19
4. Asimetri Informasi	21
5. Ketaatan Aturan Akuntansi	22
6. Implementasi <i>Good Governance</i>	24

B. Telaah Penelitian Sebelumnya	25
C. Perumusan Hipotesis	27
D. Model Penelitian	32
BAB III METODA PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Populasi dan Sampel	33
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	34
D. Alat Analisis Data	36
1. Statistik Deskriptif	36
2. Uji Kualitas Data	36
3. Analisis Regresi Linear Berganda	38
4. Pengujian Hipotesis	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Statistik Deskriptif Data	42
B. Statistik Deskriptif Responden	42
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	44
D. Uji Kualitas Data	45
E. Analisis Regresi Linear Berganda	47
F. Pengujian Hipotesis	48
G. Pembahasan	53
BAB V KESIMPULAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Keterbatasan Penelitian	58
C. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Temuan Kasus Korupsi di Wilayah Eks-Karisidenan Kedu.....	4
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel.....	34
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	42
Tabel 4.2 Profil Responden.....	43
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	46
Tabel 4.5 <i>Cross Loading</i>	46
Tabel 4.6 Pengujian Reliabilitas	47
Tabel 4.7 Koefisien Regresi	48
Tabel 4.8 Uji R^2	48
Tabel 4.9 Uji F	49
Tabel 4.10 Uji t	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	32
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F.....	40
Gambar 3.2 Penerimaan Hipotesis positif.....	41
Gambar 3.3 Penerimaan Hipotesis Negatif.....	41
Gambar 4.1 Nilai Uji F.....	50
Gambar 4.2 Kurva penerimaan uji t variabel EPI.....	51
Gambar 4.3 Kurva penerimaan uji t variabel AI.....	51
Gambar 4.4 Kurva penerimaan uji t variabel KAA	52
Gambar 4.5 Kurva penerimaan uji t variabel IGG.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	65
Lampiran 2. Daftar Sampel dan Pengembalian Kuesioner	74
Lampiran 3. Tabulasi Data Kuesioner (Data Mentah)	75
Lampiran 4. Tabulasi Data Kuesioner (Setelah Validasi).....	86
Lampiran 5. Statistik Deskriptif	95
Lampiran 6. Uji Validitas.....	96
Lampiran 7. Uji Reliabilitas	104
Lampiran 8. Uji Hipotesis	106
Lampiran 9. Bukti Penerimaan Kuesioner	107
Lampiran 10. Surat Izin Penelitian.....	110

ABSTRAK

PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, ASIMETRI INFORMASI, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)

**Oleh:
Sisca Amalia**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 65 responden, berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu pegawai yang mempunyai jabatan fungsional sebagai kepala dinas, bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran, kepala sub bagian keuangan dan staf bagian keuangan yang telah bekerja minimal 1 tahun. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, dan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan implementasi *good governance* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kata kunci: efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, implementasi good governance, dan kecenderungan kecurangan akuntansi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kecurangan sudah sering terjadi pada lembaga swasta ataupun lembaga pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Tata kelola yang baik (*good governance*), merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkualitas dan berkompeten. OPD merupakan instansi pada pemerintahan daerah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah yaitu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat akuntabilitas keuangan.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Dewi & Ratnadi, 2017). Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat mengenai aktivitas keuangan di pemerintah daerah. Kecurangan akuntansi sebagai salah satu yang timbul dari

kecurangan yang terdapat pada laporan keuangan yang berupa salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan pada laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan (IAI, 2001). (Dewi & Ratnadi, 2017), Laporan keuangan merupakan salah satu alat penting sebagai bahan dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan memuat segala informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya yaitu *stakeholders*. Laporan keuangan berisi tentang kondisi keuangan suatu organisasi. Laporan keuangan harus disusun sebaik mungkin sesuai dengan data yang akurat dan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan organisasi pemerintahan berisi tentang laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. ACFE (2009), mengkategorikan tiga kelompok skema kecurangan yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi.

Jenis kecurangan yang paling sering terjadi pada entitas pemerintahan adalah korupsi. Menurut Wilopo (2006) tindakan korupsi yang umumnya dilakukan adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan *mark up* yang dapat merugikan keuangan negara. Berdasarkan hasil survey transparansi internasional pada tahun 2017, Indonesia menempati posisi 96 dari 180 negara dengan nilai CPI (*Corruption Perception Index*) sebesar 37 (news.detik.com, 2017). Hal ini diperkuat dengan banyaknya kasus penyalahgunaan dan penggelapan anggaran negara di pemerintahan, seperti dikutip dari publikasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat ada 576 kasus korupsi di tahun 2017. Kasus tersebut merugikan negara sebesar Rp 6,5

triliun dan nilai suap Rp 211 miliar dengan jumlah tersangka sebanyak 1.298 tersangka dimana jumlah terbanyak berasal dari aparatur sipil negara (ASN) dari lingkup pemerintah daerah dan kementerian sebanyak 495 kasus (Antikorupsi.org, 2017). Kerugian negara akibat korupsi pada 2018 mencapai Rp 9,29 triliun. Hal ini merupakan hasil kajian dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Hasil pemantauan ICW pada tahun 2018 ada 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa (Kompas.com). Sepanjang 2019, penegak hukum berhasil menindak kasus korupsi sebanyak 271 kasus dengan menetapkan tersangka sebanyak 580 orang. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi sebesar Rp8,4 triliun. Suap menjadi modus yang paling dominan dilakukan oleh para tersangka korupsi.

Berdasarkan database Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, jumlah kasus korupsi yang terjadi di Jawa Tengah tahun 2018 berjumlah 222 kasus. Jumlah tersebut naik 7 kasus dari tahun 2017 yang berjumlah 215 kasus. Sedangkan Awal tahun 2020, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang mengungkapkan data penanganan korupsi di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah sepanjang 2019. Ada 95 perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang berhasil disidangkan.

Beberapa tahun terakhir, temuan kasus korupsi di pemerintah daerah di lingkup Karesidenan Kedu meningkat. Berdasarkan temuan kasus-kasus tersebut, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah masih belum baik. Fajarina, dkk (2012) mengemukakan bahwa penerapan otonomi

daerah mengakibatkan pendelegasian wewenang pemerintah pusat banyak dilimpahkan ke daerah kabupaten/kota sehingga berpotensi memindahkan kecurangan dari pusat ke daerah juga lebih banyak.

Tabel 1.1 Temuan Kasus Korupsi di Wilayah Karisidenan Kedu

No	Tahun	Kasus	Kota/Kab	Sumber
1.	2013	Kasus korupsi yang merugikan negara senilai Rp 1,57 m	Kota Magelang	(Kejaksaan.go.id)
2.	2015	Kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara Rp 126,7 juta	Wonosobo	(Kejaksaan.go.id)
3.	2016	Kasus korupsi yang merugikan negara senilai Rp 4,8 m	Kebumen	(Kpk.go.id)
4.	2017	Kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara Rp 1,4 m	Temanggung	(Temanggungkab.go.id)
5.	2018	Kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 90,6 juta	Kab Magelang	(Bpk.go.id)
6.	2019	Kasus korupsi di OPD Kabupaten Magelang yang dilakukan sejak 2017 hingga terungkap pada 2019 yang melibatkan ASN sehingga kerugian negara mencapai Rp 2,06 M	Kab Magelang	(Bpk.go.id)
7.	2019	Kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 350 juta	Purworejo	(Kejari-purworejo.go.id)

Sumber: Data yang diolah, 2020

Kabupaten Magelang merupakan bagian dari wilayah Karisidenan Kedu juga tidak luput dari sorotan media terkait temuan kasus korupsi. Sesuai dengan yang terjadi di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 terjadi kasus korupsi, yaitu kasus pembangunan jembatan yang merugikan negara Rp 90,6 juta. Baru-

baru ini juga terjadi kasus korupsi yang kerugiannya mencapai Rp 2,06 M. Kasus ini dilakukan sejak tahun 2017 hingga terungkap pada tahun 2019 dengan meliputi asset di OPD Kabupaten Magelang (Bpk.go.id).

Penelitian sebelumnya memiliki banyak faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi, diantaranya adalah efektivitas pengendalian internal. Pengendalian internal menurut (PP No. 8 Tahun 2006) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai pada pencapaian efektifitas, efesiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi yaitu PSAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Keefektifan pengendalian internal juga dapat mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan yang terjadi pada perusahaan atau instansi. Pada penelitian Rahmah & Haryoso (2018) efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hasil tersebut didukung oleh penelitian Badewin (2018). Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Rizky & Fitri (2017) menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Asimetri informasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Zainal (2013), asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan atau menerima informasi. Jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak

pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Asimetri informasi dapat menimbulkan kecurangan akuntansi dan biasanya dapat terjadi pada saat proses penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Bila terjadi asimetri informasi, maka kesempatan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan akan semakin besar. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Tarigan (2016) & Bartenputra (2016) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Setiawan dkk, (2015) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi adalah ketaatan aturan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga akan cenderung melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku (Shintadevi, 2015). Informasi yang ada pada laporan keuangan harus dapat diandalkan karena sangat dibutuhkan oleh investor dan pihak manajemen, namun apabila informasi pada laporan keuangan tidak ada keandalannya maka dapat merugikan perusahaan sehingga sangat dibutuhkan suatu standar akuntansi untuk menjaga keandalan informasi pada laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari et al., (2015) dan Ramaidha (2017) yang menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap

kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian Gustina (2018) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor terakhir adalah implementasi *good governance*. Implementasi *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan *good governance* adalah sebagai pelayanan publik. Implementasi *good governance* merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang makmur. Hal ini mungkin saja terjadi pada lembaga pemerintah yaitu OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dimana jika lembaga pemerintah tidak memiliki manajemen yang baik maka akan mengakibatkan timbulnya kecurangan. Penelitian yang dilakukan Sari et al., (2015) dan Dewi et al., (2017) menyatakan bahwa implementasi *good governance* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Badewin (2018) bahwa implementasi *good governance* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini mengacu pada riset yang dilakukan oleh Rahmah & Haryoso (2018) dengan persamaan variabel penelitian dan alat analisis. Sedangkan perbedaannya adalah **pertama**, menambah variabel yaitu implementasi *good governance*, karena implementasi *good governance* merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta,

dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang makmur. Hal ini mungkin saja terjadi pada lembaga pemerintah yaitu OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dimana jika lembaga pemerintah tidak memiliki manajemen yang baik maka akan mengakibatkan timbulnya kecurangan. Semakin tinggi implementasi *good governance* semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi. Hal ini sejalan dengan Wilopo (2006), bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi adalah melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara optimal.

Kedua, Objek penelitian OPD Kabupaten Magelang karena Kabupaten Magelang merupakan bagian dari wilayah eks-karisidenan juga tidak luput dari sorotan media terkait temuan kasus korupsi. Diantara wilayah eks-karisidenan Kedu, Kabupaten Magelang mengalami peningkatan kasus dari 2018-2019 yaitu sebesar 2 kasus korupsi terungkap. Kasus korupsi di Kabupaten Magelang ini termasuk kasus terbanyak diantara kasus korupsi di wilayah eks-karisidenan Kedu lainnya. Sesuai dengan yang terjadi di Kabupaten Magelang, baru-baru ini terjadi kasus korupsi dengan kerugiannya mencapai Rp 2,06 M. Kasus dugaan korupsi ini dilakukan sejak tahun 2017 hingga terungkap pada tahun 2019 yang dilakukan oleh ASN dengan meliputi asset di OPD Kabupaten Magelang (Bpk.go.id).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
4. Apakah implementasi *good governance* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *good governance* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat teoritis:

- a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti terhadap bukti empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.

- b. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumber referensi yang dapat dijadikan pembandingan bagi penelitian lain yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian yang sama.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Organisasi Perangkat Daerah lain umumnya, penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk menanggulangi kecurangan akuntansi.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang terlibat di Pemerintah.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran

BAB II

TINJUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

Cressey (1950) mengemukakan hipotesis mengenai *fraud triangle* untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan *fraud*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa orang melakukan *fraud* ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan / pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka.

Keterkaitan teori *fraud triangle* terhadap penelitian ini untuk menjelaskan alasan seseorang melakukan kecurangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan ilegal yaitu kecurangan. Teori ini juga mengemukakan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. Dari penjelasan di atas, diungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan *fraud*, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi).

a. *Pressure*

Pressure (tekanan) memiliki berbagai arti, diantaranya keadaan dimana kita merasa ditekan, kondisi yang berat saat kita menghadapi kesulitan, sesuatu yang dapat membuat kita meningkatkan perhatian untuk melakukan tindakan, meningkatkan ingatan dan kemampuan mengingat. Dengan kata lain, *pressure* dapat meningkatkan kinerja, akan tetapi, di lain pihak dapat menjadi salah satu sumber dari munculnya *fraud* dan akhirnya menjadi salah satu elemen dari *fraud triangle*. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan *pressure* adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud*. Contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

b. *Opportunity*

Opportunity adalah peluang / kesempatan yang dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling mendasari terjadinya kecurangan. Peluang ini dapat muncul kapan saja,

sehingga pengawasan dan kontrol internal perusahaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya peluang seseorang melakukan kecurangan. Seseorang yang tanpa tekanan sekalipun dapat melakukan kecurangan dengan adanya peluang ini, meskipun pada awalnya tidak ada peluang untuk melakukan ini.

c. *Rationalization*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan bahwa faktor ketiga terjadinya sebuah *fraud* adalah rasionalisasi. Secara garis besar rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak di keadaan yang buruk. Pelaku akan mencarialasan untuk membenarkan kejahatan untuk dirinya agar tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Spillane (2003) rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup di masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan, secara tidak langsung rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Cara berasionalisasi yang sering terjadi adalah memindahkan kebenaran dasar sejajar dengan prestasi yang tidak tepat, namun sebaliknya rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan penghargaan diri yang palsu. Para pakar sosiolog merujuk pada proses di mana peningkatan jumlah tindakan sosial menjadi berdasarkan pertimbangan efisiensi perhitungan bukan pada motivasi yang berasal dari moralitas, emosi, kebiasaan atau tradisi.

Rasionalisasi menjadi elemen penting terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya: (a) bahwa tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, (b) masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dan lain-lain), (c) perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

2. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Menurut Hartadi (2004) pengelapan (*fraud*) dapat diarti sebagai penyajian yang keliru atau usaha menyembunyikan kesalahan dengan maksud menipu pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian. Menurut (Hall, 2009) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai suatu tindakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya.

Kecenderungan kecurangan adalah suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Kecenderungan kecurangan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan uang lebih supaya bisa menghimpun kekayaan dan bisa dilakukan untuk dapat mengamankan kepentingan pribadi maupun usahanya. Kecurangan bisa dilakukan dengan cara pencurian, penggelapan, menyembunyian, dan masih banyak yang lainnya (Bartenputra, 2016)

ACFE (Tuanakotta, 2010) membagi *fraud* (kecurangan) menjadi 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu:

a. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen pada salah satu material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.

b. Penyimpangan atas Aset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

c. Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Diantaranya termasuk penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak

sah/illegal (*illegal gratuities*) dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yang sering disebut teori GONE (Pusdiklatwas BPKP, 2008) yaitu:

- a. *Greed* (keserakahan)
- b. *Opportunity* (kesempatan)
- c. *Need* (kebutuhan)
- d. *Exposure* (pengungkapan)

Faktor *greed* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan pelaku *fraud* atau disebut faktor individu. Adapun faktor *opportunity* dan *exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban.

a. Faktor generik

Faktor generik yang meliputi *opportunity* (kesempatan) dan *exposure* (pengungkapan) merupakan faktor yang berada pada pengendalian organisasi. Pada umumnya kesempatan melakukan *fraud* selalu ada pada setiap kedudukan, hanya saja adanya kesempatan besar maupun kecil tergantung kedudukan pelaku menempati kedudukan pada manajemen atau pegawai biasa. Adapun pengungkapan berkaitan dengan kemampuan dapat diungkapkannya dapat diungkapkannya suatu *fraud*, dan sifat serta luasnya

hukuman bagi pelakunya. Semakin besar pengungkapan *fraud* yang terjadi, maka kemungkinan pelaku melakukan *fraud* semakin kecil.

b. Faktor individu

Faktor individu yang meliputi *greed* (keserakahan) dan *need* (kebutuhan) merupakan faktor yang ada pada diri masing-masing individu, dengan arti berada diluar pengendalian organisasi. Faktor ini terdiri atas dua unsur yaitu:

- 1) *Greed factor*, yaitu moral yang meliputi karakter, kejujuran dan integritas yang berhubungan dengan keserakahan.
- 2) *Need factor*, yaitu motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan seperti terlilit hutang atau bergaya hidup mewah.

Menurut (Amrizal, 2015) pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membangun struktur pengendalian yang baik untuk memperkuat pengendalian intern di perusahaan, COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu rerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian intern terdiri atas (lima) komponen yang saling terkait yaitu: (a) Lingkungan pengendalian (*control environment*) (b) Penaksiran risiko (*risk assessment*) (c) Standar Pengendalian

(*control activities*) (d) Informasi dan komunikasi (*information and communication*) (e) Pemantauan (*monitoring*)

- b. Mengefektifkan aktivitas pengendalian (a) Review kinerja (b) Pengolahan informasi (c) Pengendalian fisik (d) Pemisahan tugas
- c. Meningkatkan kultur organisasi Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- d. Mengefektifkan fungsi internal audit.

3. Efektivitas Pengendalian Internal

Efektivitas yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan seharusnya diselesaikan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Namun ketika sesuatu yang telah direncanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya atau terjadi kecurangan-kecurangan maka hal ini akan menghambat efektivitas organisasi. Untuk menghindari adanya tindakan-tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pegawai dan menghasilkan laporan keuangan yang informatif dan akurat maka diperlukan pengendalian internal yang memadai khususnya pada asset kas.

Pengendalian internal menurut (PP No. 8 Tahun 2006) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk pencapaian efektivitas, efesiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dan keandalan penyajian laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi yaitu PSAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Keefektifan pengendalian internal adalah keberhasilan yang dicapai manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan atau instansi yang berkaitan dengan menjaga keandalan penyajian laporan keuangan, efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Keefektifan pengendalian internal juga dapat mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan yang terjadi pada perusahaan atau instansi. Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian internal antara lain: manajemen, dewan komisaris dan komite audit, auditor internal, personil lain entitas, auditor independen, dan pihak luar lainnya. Sistem pengendalian yang efektif diharapkan mampu mengurangi perilaku yang tidak etis yang akan dilakukan oleh pihak manajemen demi kepentingan pribadi dan dapat mencegah adanya tindakan menyimpang yang akan dilakukan oleh pihak manajemen untuk keuntungan pribadi seperti melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi (Fauwzi, 2011).

Menurut Gondodiyoto (2007), faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur organisasi semakin rumit.
- b. Tanggung jawab bersama untuk melindungi asset organisasi, mencegah dan kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan terletak pada

manajemen sehingga manajemen harus mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

- c. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi pada manusia.

4. Asimetri Informasi

Najahningrum (2013) menyatakan bahwa apabila terjadi kesenjangan informasi pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana antara pihak yang menyampaikan informasi dengan pihak yang menerima informasi terdapat ketidakselarasan pada informasi tersebut.

Menurut Zainal (2013), asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan atau menerima informasi. Jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Asimetri informasi dapat menimbulkan kecurangan akuntansi dan biasanya dapat terjadi pada saat proses penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Bila terjadi asimetri informasi, maka kesempatan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan akan semakin besar.

(Jensen & Meckling, 1976), ada dua tipe asimetri informasi yaitu:

a. Adverse selection

Adverse selection adalah sejenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangusungkan suatu transaksi usaha, atau

transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* dapat terjadi karena salah satu pihak lebih mengetahui kondisi kini dan prospek kedepan suatu organisasi.

b. Moral hazard

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak yang lainnya tidak.

5. Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan akuntansi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga akan cenderung melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku (Shintadevi, 2015). Standar akuntansi berisi aturan-aturan yang yang harus digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berdasarkan pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI sehingga standar akuntansi dirancang dan dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan (Rahmawati, 2012). Informasi yang yang ada dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan karena sangat di butuhkan oleh investor dan pihak manajemen, namun apabila informasi dalam laporan keuangan tidak ada keandalanya maka dapat merugikan perusahaan sehingga sangat

dibutuhkan suatu standar akuntansi untuk menjaga keandalan informasi dalam laporan keuangan.

Menurut (Tanjung, 2006), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Karena pelaporan keuangan memiliki peranan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen, membantu pengguna laporan untuk mengevaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kebijakan secara periodik sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan umum.
- c. Transparansi, hasil pelaporan keuangan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat umum memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- d. Keseimbangan antar generasi, membantu pengguna dalam mengetahui penerimaan pemerintah secara periodisasi untuk membiayai seluruh pengalokasian dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

6. Implementasi *Good Governance*

Menurut bahasa *Good Governance* berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *Good* yang berarti baik dan *governance* yang berarti tata pemerintahan. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), *good governance* didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintahan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP).

Implementasi *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan *good governance* adalah sebagai pelayanan publik. Implementasi *good governance* merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang makmur. Hal ini mungkin saja terjadi pada lembaga pemerintah yaitu OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dimana jika lembaga pemerintah tidak memiliki manajemen yang baik maka akan mengakibatkan timbulnya kecurangan. (Wilopo, 2006) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah satu yang menimbulkan kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah satu atau menghilangkan secara sengaja (penyalahgunaan atau penggelapan).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2 1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Variabel penelitian	Hasil
1.	Zainal (2013)	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) (Studi Empiris Kantor Cabang Bank Pemerintah Dan swasta Di Kantor Padang)	Efektivitas pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecurangan Akuntansi
2.	Sari et al., (2015)	Pengaruh efektifitas sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi dan implementasi <i>good governance</i> terhadap kecenderungan fraud (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Tabanan)	Implementasi <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>fraud</i> .
3.	Bartenputra (2016)	Pengaruh kesesuaian kompensasi, ketaatan akuntansi dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi empiris pada skpd kota bukitinggi)	Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
4.	Tarigan (2016)	Pengaruh moralitas individu, asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi pada BUMD Provinsi Riau)	Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
5.	Dewi & Ratnadi (2017)	Pengaruh pengendalian internal dan integritas pada kecenderungan	Pengendalian internal berpengaruh negatif pada kecenderungan

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Variabel penelitian	Hasil
		kecurangan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar	Kecurangan akuntansi.
6.	Rizky & Fitri (2017)	Pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum, dan perilaku tidak etis terhadap kecurangan akuntansi	Efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan akuntansi.
7.	Udayani dan Sari (2017)	Pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu pada kecenderungan kecurangan akuntansi	Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
8.	Ramaidha (2017)	Pengaruh keefektifan pengendalian internal, Ketaatan aturan akuntansi, dan kepuasan kerja terhadap kecurangan akuntansi	Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara ketaatan aturan akuntansi dengan kecurangan akuntansi
9.	Badewin (2018)	Pengaruh efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi dan implementasi <i>good governance</i> terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Pada skpd kab. Indragiri hilir	Implementasi <i>good governance</i> berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
10.	Rahmah & Haryoso (2018)	Pengaruh moralitas individu, asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Studi pada BUMD Provinsi Riau)	Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Sumber: Data penelitian sebelumnya

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Keefektifan pengendalian internal adalah keberhasilan yang dicapai manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan atau instansi yang berkaitan dengan menjaga keandalan dalam penyajian laporan keuangan, efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Keefektifan pengendalian internal juga dapat mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan yang terjadi pada perusahaan atau instansi. Sistem pengendalian yang efektif diharapkan mampu mengurangi perilaku yang tidak etis yang akan dilakukan oleh pihak manajemen demi kepentingan pribadi dan dapat mencegah adanya tindakan menyimpang yang akan dilakukan oleh pihak manajemen untuk keuntungan pribadi seperti melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi (Fauwzi, 2011).

Teori *fraud triangle* menjelaskan adanya dorongan dan peluang (*pressure* dan *opportunity*) seorang pemimpin maupun orang yang diberikan wewenang. Secara singkat seorang pimpinan organisasi harus bisa memberikan keyakinan dan contoh kepada pegawai agar bertindak sesuai peraturan yang berlaku agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila ada dorongan dan peluang yang besar dalam suatu organisasi. Efektivitas pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi diharapkan dapat mengurangi penyebab terjadinya tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Budiantari dkk (2017) menyatakan hasil penelitiannya bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Rahmah & Haryoso (2018) menyatakan hasil penelitiannya yaitu efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin tinggi efektivitas penegendalian internal semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1. Efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Najahningrum (2013) menyatakan bahwa apabila terjadi kesenjangan informasi pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana antara pihak yang menyampaikan informasi dengan pihak yang menerima informasi terdapat ketidakselarasan di dalam informasi tersebut. Menurut Zainal (2013), asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan atau menerima informasi.

Jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang (*opportunity*) bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan, hal ini sesuai dengan teori *fraud*

triangle. Asimetri informasi dapat menimbulkan kecurangan akuntansi dan biasanya dapat terjadi pada saat proses penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Bila terjadi asimetri informasi, maka kesempatan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan akan semakin besar.

Zainal (2013) menunjukkan bahwa Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Kecurangan akuntansi. Dan didukung oleh penelitian Bartenputra (2016) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Badewin (2013) juga menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin rendah asimetri informasi maka semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

3. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Ketaatan akuntansi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga akan cenderung melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku (Shintadevi, 2015). Standar akuntansi berisi aturan-aturan yang yang harus digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berdasarkan pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI sehingga standar akuntansi dirancang dan

dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan (Rahmawati, 2012). Informasi yang ada dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan karena sangat dibutuhkan oleh pengguna dan pengelola, namun apabila informasi dalam laporan keuangan tidak ada keandalannya maka dapat merugikan organisasi sehingga sangat dibutuhkan suatu standar akuntansi untuk menjaga keandalan informasi dalam laporan keuangan.

Ketaatan aturan akuntansi menurut teori *fraud triangle* menjelaskan tentang adanya tekanan (*pressure*). Kohlberg (1969) moralitas organisasi yang tinggi juga didukung pada ketaatan aturan yang berlaku. Semakin tinggi ketaatan aturan akuntansi semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi. Penelitian (Adelin, 2013) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

H3. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

4. Pengaruh Implementasi *Good Governance* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

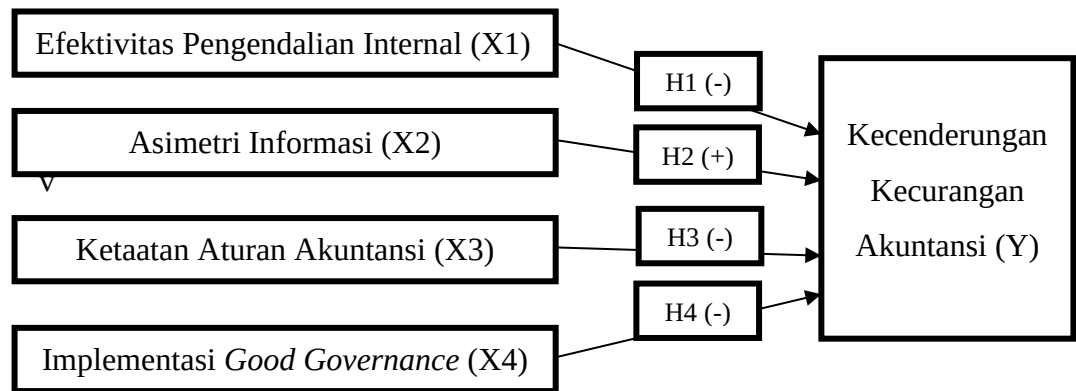
Implementasi *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan *good governance* adalah sebagai pelayanan publik. Implementasi *good governance* merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis dan efektif

sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang makmur. Hal ini mungkin saja terjadi pada lembaga pemerintah yaitu OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dimana jika lembaga pemerintah tidak memiliki manajemen yang baik maka akan mengakibatkan timbulnya kecurangan.

Berdasarkan teori *fraud triangle*, menjelaskan tentang adanya rasionalisasi (*rasionalization*). Dimana anggota organisasi akan merasionalisasi sebuah tindakan yang diambilnya yaitu suatu kecurangan akuntansi, dikarenakan anggota organisasi tersebut memiliki jabatan dan berpengaruh terhadap suatu organisasi dan menerima tindakan yang baik atas nilai-nilai dan tujuan suatu organisasi tersebut sehingga kecurangan yang dilakukan dianggap wajar. Rasionalisasi sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk.

Semakin tinggi implementasi *good governance* semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi. Hal ini sejalan dengan Wilopo (2006), bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi adalah melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara optimal. Sari dkk (2015) menyatakan bahwa Implementasi *good governance* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

H4. Implementasi *good governance* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

D. Model Penelitian**Gambar 2.1 Model Penelitian**

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dari responden pada kantor OPD di Kabupaten Magelang dengan menyebar kuesioner kepada Kepala OPD, bendahara penerimaan atau pengeluaran, kepala bagian keuangan dan staf bagian keuangan pada OPD di Kabupaten Magelang.

B. Populasi dan Sampel

Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai sifat sama, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, sample pada penelitian ini adalah:

- 1) Kepala OPD selaku pengguna anggaran
- 2) Kepala bagian keuangan dan staf bagian keuangan
- 3) Bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan karena mereka memahami masalah akuntansi, selain itu pada umumnya mereka terlibat dengan kegiatan keuangan pada organisasi pemerintahan daerah, dan
- 4) Memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Dependen			
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA)	ACFE (Tuanakotta, 2010) membagi <i>fraud</i> (kecurangan) menjadi 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu: kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi.	a) Kecurangan Laporan Keuangan b) Penyalahgunaan Aset c) Korupsi (Rizky & Fitri, 2017)	Skala Interval
Independen			
Efektivitas Pengendalian Internal (EPI)	(Adelin, 2013), pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efesiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Keefektifan pengendalian internal adalah keberhasilan yang dicapai manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan atau instansi yang berkaitan dgn menjaga keandalan dalam penyajian laporan keuangan, efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku.	a) Lingkungan Pengendalian b) Penaksiran Resiko c) Aktivitas Pengendalian d) Inforamsi dan Komunikasi e) Pemantauan dan monitoring (Rizky & Fitri, 2017)	Skala Interval

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel (Lanjutan)

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Asimetri Informasi (AI)	Asimetri informasi ini timbul karena <i>principal</i> tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja <i>agent</i> dan <i>agent</i> memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan (Rahmawati, 2012). Asimetri informasi yang terjadi antara <i>principals</i> dan <i>agent</i> mendorong terjadinya informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja <i>agent</i> .	a) Informasi laporan keuangan b) Hubungan transaksi keuangan c) Kerahasiaan informasi d) Tanggung jawab informasi (Komang & Supadmi, 2017)	Skala Interval
Ketaatan Aturan Akuntansi (KAA)	Ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban bagi organisasi untuk mematuhi segala aturan akuntansi dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan agar tercipta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang berkualitas. Ketaatan akuntansi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga akan cenderung melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku (Shintadevi, 2015).	a) Tanggung jawab penerapan b) Integritas c) Objektivitas d) Kehati-hatian e) Kerahasiaan f) Konsistensi g) Standar teknis (Rizky & Fitri, 2017)	Skala Interval
Implementasi <i>Good Governance</i> (IGG)	Menurut bahasa <i>Good Governance</i> berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa inggris yaitu <i>Good</i> yang berarti baik dan	a) Profesionalitas b) Akuntabilitas c) Transparansi d) Pelayanan Prima e) Demokrasi dan Partisipasi	Skala Interval

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel (Lanjutan)

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	<i>governance</i> yang berarti tata pemerintahan. Menurut <i>United Nation Development Program</i> (UNDP), <i>good governance</i> didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintahan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. <i>Good governance</i> merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan public (Arens, 2015).	f) Efisiensi dan Efektivitas g) Supremasi Hukum (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000)	

Sumber: beberapa artikel yang diolah 2020

D. Alat Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah penyajian data yang dilakukan secara numerik. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui dan memaparkan karakteristik variabel penelitian dan kondisi dari responden. Penjelasan dalam analisis deskriptif hanya menjelaskan nilai maksimum, nilai minimum, varian, *mean*, dan standard deviasi (Ghozali, 2018).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan alat ukur mengukur sah atau valid

tidaknya kusioner (Ghozali, 2018). Kuisisioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. *Confirmatory Factor Analisis* (CFA) digunakan untuk menguji validitas instrument kuisisioner dalam penelitian ini. CFA digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi suatu variabel. Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan indikator kedalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, selanjutnya akan mengelompokkan menjadi satu dengan faktor *loading* yang tinggi.

Analisis faktor dapat digunakan apabila data matrik memiliki kolerasi yang cukup. Uji *Barlett of Sphericity* merupakan uji statistic untuk menentukan ada tidaknya kolerasi antar variabel. Selain itu, *Kaiser Meyer Olkin Measure of Smapling Adequasi* (KMO NSA) merupakan alat uji yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat *interkolerasi* antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan *cross loading* $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Uji relibilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Kusioner dikatakan

reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten. Kusioner dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,7$ atau 70% (Ghozali, 2018).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi dan implementasi *good governance* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Adapun model persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$KKA = \alpha - \beta_1 EPI + \beta_2 AI - \beta_3 KAA - \beta_4 IGG + e$$

Keterangan:

KKA : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

β_1, β_2 : Koefisien Regresi dari X

EPI : Efektifitas Pengendalian Internal

AI : Asimetri Informasi

KAA : Ketaatan Aturan Akuntansi

IGG : Implementasi *Good Governance*

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji R^2 (koefisien determinasi)

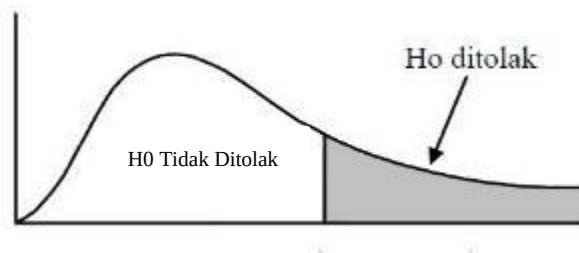
Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi

variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, komitmen organisasi, budaya organisasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap variabel dependen yaitu kecurangan akuntansi. Besarnya koefisien 0 sampai 1, semakin mendekati 0 koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel independen, sebaliknya mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel independen (Ghozali, 2018).

b. Uji F (*goodness of fit test*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of Fit Test*). Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dan model dalam penelitian telah *fit* atau tidak. Pengujian yang dilakukan dengan distribusi F adalah membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel (Ghozali, 2018). Keputusan yang diambil:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 5\%$, maka model dalam penelitian layak atau *fit*.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 5\%$, maka model dalam penelitian tidak layak atau tidak *fit*.



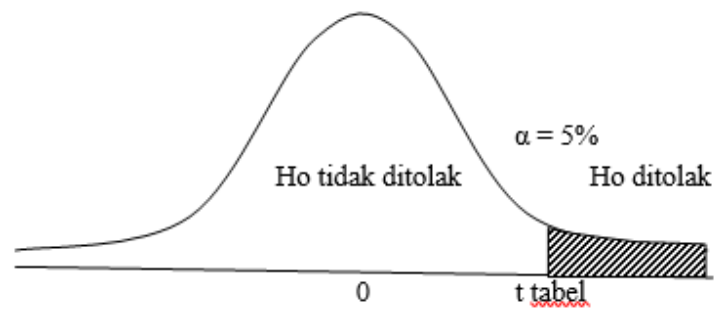
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F

c. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018).

a) Hipotesis Positif

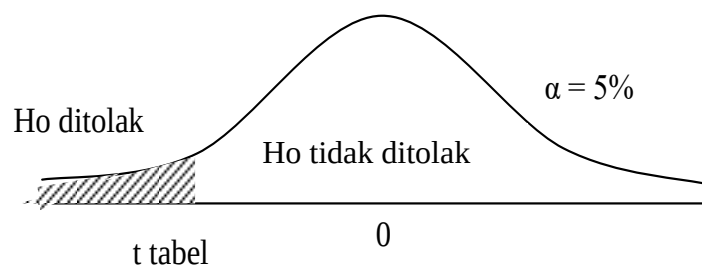
- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka h_0 ditolak dan h_a diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka h_0 diterima dan h_a tidak diterima berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3 2 Penerimaan Hipotesis positif

b) Hipotesis Negatif

- 1) H_0 ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) H_0 diterima jika $-t \text{ hitung} > -t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3.3 Penerimaan Hipotesis Negatif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, dan implementasi *good governance* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Magelang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 65 pegawai dari 23 OPD di Kabupaten Magelang yang memiliki jabatan sebagai kepala dinas, bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran, kepala sub bagian keuangan dan staf bagian keuangan. Temuan hasil penelitian ini yaitu efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, dan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan implementasi *good governance* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan penarikan kesimpulan yang kurang sempurna karena sampel yang digunakan di Dinas dan Badan sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di seluruh kabupaten lain.
2. Pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan jawaban dari responden pada kuesioner yang disebar. Hal tersebut akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Serta hasil penelitian ini hanya didasarkan pada data secara tertulis dari kuesioner.

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan sampel yang tidak sesuai kriteria. Dikarenakan kuesioner tidak tersampaikan kepada Kepala OPD selaku pengguna anggaran.
4. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, dimana variabel yang diteliti hanya efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, dan implementasi *good governance*. Masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah sampel dan perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek-aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian sehingga kuesioner yang akan digunakan selanjutnya memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Selain menggunakan kuesioner, peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik wawancara.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan memastikan penyebaran kuesioner sesuai sasaran kriteria sampel keseluruhan.
4. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi seperti Komitmen Organisasi (Febriani & Suryandari, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Adelin, V. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada BUMN di Kota Padang).
- Amrizal. (2015). Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan. *Pengantar Auditing*, 5(Internal Audit), 1–17.
- Antikorupsi.org. (2017).
- Badewin. (2018). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Skpd Kab. Indragiri Hilir. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Bartenputra, A. (2016). *Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Akuntansi Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi empiris pada SKPD Kota Bukittinggi)*.
- Bpk.go.id.
- detik. com.
- Dewi, K. Y. K., dan Ratnadi, N. M. D. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Integritas Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 18, 917–941.
- Fajarina, Wirda, D. dan A. B. U. (2012). Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Serta Pemantauan Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada SKPD di Pemerintah Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol.1 No.1.
- Fauwzi, M. G. H. (2011). Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*, 1–27.
- Febriani, F., dan Suryandari, D. (2019). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (fraud): Persepsi pegawai pada Dinas Kota Tegal. *Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu*, 9(1), 33–46.
- Fraud, A. of C., and Examiners. (2009). *Managing the Business Risk of Fraud : A Practical Guide*. US

- Ghozali, I. (2018). *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Gondodiyoto, S. (2007). *Audit Sistem Informasi: Pendekatan COBIT* (edisi revi). Mitra Wacana Media.
- Hall, J. A. (2009). *Accounting Information Systems Seventh Edition*. Jakarta Salemba Empat
- Indonesia, I. A. (2001). *Standar Pemeriksaan Akuntan Publik*. SA Seksi 319, 1–30.
- Jensen, C., and Meckling, H. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure I*. 3, 305–360.
- Kejaksaan.go.id.
- Kejari-purworejo.go.id.
- Komang, L. L. N., dan Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas dan Asimetri Informasi pada Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 389–417.
- Komang Tri Kartika Dewi, Made Arie Wahyuni, N. T. H. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Kas, Implementasi Good Governance, Moralitas Aparatur Pemerintah Daerah, Dan Persepsi Kesesuaian Kompensasi Terhadap Financial Fraud (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 7(1).
- Kompas.com.
- Kpk.go.id.
- Made dwi setiawan, I Made Adi Pradana Adiputra, G. A. Y. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, Dan Keadilan Organisasi Terhadap Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 3(1).
- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) : Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Lib.Unes.Ac.Id*, 1–224.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

- Rahmah, R. N., dan Haryoso, P. (2018). Pengaruh Moralitas Individu, Efektifitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen). *Advance*, 5(2), 2018.
- Rahmawati, A. P., dan Soetikno, I. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang). *Jurnal Publikasi Universitas Diponegoro*.
- Ramaidha, R. (2017). Pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan kepuasan kerja terhadap kecurangan akuntansi. *Jurnal Profita Edisi 4, 1*, 1–14.
- Rizky, M., dan Fitri, F. A. (2017). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum, dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(2), 10–20.
- Sari, A. A. K. F. U. dan M. M. R. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 18, 1774–1799.
- Sari, N. L. P. P., Yuniarta, G. A., dan Adiputra, I. M. P. (2015). Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi Good Governance terhadap Kecenderungan Fraud (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Tabanan). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–11.
- Shintadevi, P. F. (2015). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. *Metrologia*, 53(5), 1–116.
- Spillane, J. P. (2003). Educational Leadership. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 25(4).
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Tanjung, A. H. (2006). *Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi*. Bandung. Alfabeta.
- Tarigan, L. B. (2016). Faculty of Economics Riau University ,. *JOMFekom*, 4(1), 1960–1970.

Temanggungkab.go.id.

Tuanakotta, T. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta. Salemba Empat.

Wilopo. (2006). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Jurnal Riset Dan Akuntansi Indonesia*, 9(3), 346–366.

Zainal, R. (2013). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) (Studi Empiris Kantor Cabang Bank Pemerintah Dan swasta Di Kantor Padang). *Annals of the Association of American Geographers*, 93(2), 314–337.